

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM MEWUJUDKAN KOTA TANGGUH BENCANA BANJIR

Muhammad Hilmi Ihsan

NPP 31.0686

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: ihsanhilmi0@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. M. Amin, M.M., M.Ak

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of flooding in Banjarmasin City which shows the weakness of regional resilience to disasters so that strategies are needed by the regional government to make Banjarmasin city a resilient city for flood disasters. **Purpose:** This research was conducted to determine the strategy of the regional government of the city of Banjarmasin in formulating, implementing and evaluating to create a city that is resilient to flood disasters. **Method:** This research uses qualitative research with descriptive methods through an inductive approach with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Data collection techniques were carried out through interviews with 10 informants. **Results:** The research results obtained show that the Regional Government of the City of Banjarmasin is in a strategy to increase the city's resilience to flood disasters by implementing various policies such as normalizing rivers, dredging sedimentation, managing syntax waste and socializing to increase public awareness about the importance of maintaining river cleanliness to create a city. Banjarmasin has become a city that is resilient to flood disasters. **Conclusion:** The strategy implemented by the Banjarmasin City Regional Government is already working. The author suggests to the Banjarmasin City Regional Government to continue implementing the river normalization program in an effort to control floods in Banjarmasin and increase socialization regarding the importance of keeping rivers clean as a community need. This socialization requires participation and awareness from all components of society so that Banjarmasin can become a city that is resilient to flood disasters.

Keywords: Strategy, Regional Government, Disaster Resilient City, Flood

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan banjir di Kota Banjarmasin yang menunjukkan lemahnya ketahanan daerah terhadap bencana sehingga diperlukan strategi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kota Banjarmasin menjadi kota tangguh bencana banjir. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam merumuskan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mewujudkan kota tangguh bencana banjir **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan Teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 10 informan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam strategi meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana banjir dengan melakukan berbagai kebijakan seperti melakukan normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pengelolaan sampah surung sintak dan sosialisasi

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara kebersihan sungai untuk mewujudkan Kota Banjarmasin menjadi Kota tangguh bencana banjir. **Kesimpulan:** Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sudah berjalan. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin untuk terus melaksanakan program Normalisasi sungai dalam upaya pengendalian banjir di Banjarmasin serta meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai sebagai kebutuhan masyarakat. Sosialisasi ini memerlukan partisipasi dan kesadaran dari seluruh komponen masyarakat sehingga bisa mewujudkan Banjarmasin sebagai kota yang tangguh bencana banjir.

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Kota Tangguh Bencana, Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah daerah yang berada pada garis khatulistiwa, yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia. Keberadaan tersebut mengakibatkan Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim tropis ini membuat curah hujan tinggi tetapi juga membuat sinar matahari bersinar sepanjang tahun. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 menerangkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu dampak curah hujan tinggi adalah bencana banjir. Menurut BNPB (2016), Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir sering terjadi akibat curah hujan tinggi yang turun terus menerus hingga menyebabkan meluapnya air sungai sebagai akibat debit air yang diluar daya tampung media penopang air dari curah hujan. Banjir di Kalimantan Selatan sering terjadi dalam skala yang kecil serta tidak memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Namun pada awal tahun 2021 terjadi bencana banjir dengan skala yang sangat besar. Bencana banjir tersebut merupakan pertama kalinya dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Banjir ini menyebabkan 11 dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan terendam air. Penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan ini diduga oleh tingginya intensitas curah hujan yang menyebabkan meluapnya air sungai ke daerah daratan dan tempat tinggal warga. Banjarmasin merupakan salah satu dari 11 kabupaten kota yang terdampak banjir besar pada awal 2021 yang lalu. Bisa dilihat pada data bencana banjir yang terjadi di Kota Banjarmasin pada tabel data sebagai berikut :

Tabel 1. 1.
Data Jumlah KK dan Penduduk Terdampak Banjir dan Jumlah Kerusakan Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Korban					Kerusakan		
	Meninggal	Hilang	Luka	KK Terdampak	Jiwa Terdampak	Mengungsi	Rumah (unit)	Sawah (Ha)
Banjarmasin Selatan	-	-	-	7.396	18.964	1.251	7.396	1.302
Banjarmasin Timur	-	-	-	17.083	49.824	4.097	17.083	345
Banjarmasin Barat	-	-	-	-	-	-	-	25
Banjarmasin Tengah	-	-	-	940	3.219	65	940	-
Banjarmasin Utara	-	-	-	9.719	36.517	859	9.719	280
Jumlah	-	-	-	35.138	108.524	6.272	35.138	1.952

Sumber: BPBD Kota Banjarmasin (2021)

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa bencana banjir yang terjadi di Kota Banjarmasin pada awal 2021 yang lalu banyak menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan. Banjir yang terjadi sangat banyak menimbulkan banyak warga untuk melakukan pengungsian yaitu sebanyak sekitar 6.272 dan 108.524 warga terdampak. Diketahui bahwa banjir di Kota Banjarmasin terjadi di empat dari lima kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara. Dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir ini sangatlah merugikan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Kota Banjarmasin dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana pada pasal 8 bahwa pelaksanaan mitigasi secara struktural dan nonstruktural dan pasal 9 bahwa pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam menyikapi bencana banjir yang terjadi pada 2021 dengan melakukan upaya untuk meningkatkan ketangguhan kota Banjarmasin sebagai kota tangguh bencana banjir. Hal ini dilakukan dengan oleh pemerintah daerah dengan perbaikan dan pemeliharaan drainase dan aliran sungai yang bertujuan meningkatkan ketangguhan daerah Kota Banjarmasin terhadap bencana banjir.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini berlatar belakang dari bencana banjir besar yang terjadi pada awal tahun 2021 di 11 dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Banjir besar tersebut juga melanda wilayah Kota Banjarmasin yang menimbulkan dampak kerugian sangat besar. Banjir tersebut merupakan banjir terbesar yang terjadi di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Bencana banjir yang terjadi pada 2021 tersebut menunjukkan lemahnya ketangguhan daerah kota Banjarmasin terhadap bencana banjir. Melihat permasalahan banjir tersebut Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melakukan program dan kebijakan dalam meningkatkan ketangguhan dan kapasitas daerah hingga menjadikan kota Banjarmasin sebagai kota tangguh bencana banjir. Menindaklanjuti dari kebijakan Pemerintah

Daerah Kota Banjarmasin tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi yang dijalankan dalam mewujudkan kota tangguh bencana banjir.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, khususnya mengenai penanganan bencana banjir baik itu tahapan prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana. Penelitian Maula Masthura (Maula, 2022) yang berjudul *Strategi Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Banjir di Aceh Utara* menemukan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana banjir bisa dilakukan dengan mitigasi struktural dan nonstruktural.

Penelitian Novan Suryadi (Novan, 2020) yang berjudul *Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda* menyimpulkan bahwa Pemerintah dalam hal ini BPBD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik tetapi perlu didukung oleh peran masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya penebangan liar.

Penelitian Annisa S. Paramitha, R. Pamardhi Utomo & N. Miladan (Annisa dkk., 2020) dengan judul *Efektivitas Infrastruktur Perkotaan dalam Penanganan Risiko Banjir di Kota Surakarta* menyimpulkan bahwa risiko banjir dapat ditekan dengan adanya kenaikan efektivitas infrastruktur kota agar dapat menekan faktor risiko bencana kebanjiran seperti pembuatan saluran drainase yang efektif dan efisien dalam pembangunannya.

Penelitian Dicky Chandra (Dicky, 2021) dengan judul *Pengurangan Risiko Banjir Rob di Kota Dumai* temuan hasil penelitiannya yaitu bahwa cara melakukan pengurangan risiko bencana banjir bisa dengan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

Penelitian Dwi Nur Ilma Aulia (Dwi, 2019) yang berjudul *Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros* menyimpulkan bahwa untuk menangani permasalahan banjir juga diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan alam khususnya di daerah aliran sungai.

Penelitian Heni Tri Purwikasari (Henny, 2023) dengan judul *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah* temuan hasil penelitiannya yaitu Mitigasi bencana banjir di kabupaten pekalongan yang dilakukan oleh BPBD adalah mitigasi struktural berupa membangun tanggul, meninggikan jalanan, pemasangan early warning system (EWS) serta Mitigasi nonstruktural dengan dibuatnya perda penanggulangan bencana dan melakukan kajian risiko bencana.

Penelitian Danny Permana (Danny, 2023) yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Risiko Bencana banjir di Kabupaten Bandung* menyimpulkan bahwa Kabupaten Bandung melakukan bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir terutama pada musim penghujan tiba dan memberikan peringatan dini.

Penelitian Ayu Niken Agustin yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Banjir Di Kota Malang* menemukan bahwa dalam melihat permasalahan banjir yang terjadi secara simultan di Kota Malang, banyak sekali faktor yang menunjukkan keterlibatan peran pemerintah sebagai penyebabnya. Mulai dari perspektif keberlanjutan ekologis yang tidak terlihat, hingga indikasi-indikasi kecurangan berupa korupsi pada persoalan anggaran pembangunan dalam proyek mitigasi yang masih sangat mungkin terjadi (Ayu, 2023).

Berdasarkan penelitian Siti berjudul *Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon* (Siti Yuhana, 2023) menyimpulkan bahwa dalam mitigasi bencana banjir di Desa Mundu diperlukan kerjasama semua pihak baik dari masyarakat, pemerintah, maupun pemilik perusahaan di wilayah Cirebon.

Penelitian Nelvi Rahmadani dengan judul *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Dumai* temuan penelitiannya yaitu masih belum optimalnya perbaikan yang dilakukan untuk menanggulangi banjir selama ini maka dari itu pemerintah melakukan kolaborasi lanjutan antara Pemko Dumai (DLH, Dinas PUPR, dan Diskopar) dengan Pihak BBKSDA Pekanbaru untuk dapat melakukan pembangunan embung untuk menanggulangi banjir di Kota Dumai (Nelvi, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya sama-sama menilai pelaksanaan tugas untuk mencegah dan menanggulangi bencana banjir, baik banjir kiriman, banjir bandang maupun banjir rob. Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai bencana banjir dan penanganannya. Perbedaannya, pada penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana strategi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melalui dimensi teori strategi oleh David (2011) yaitu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam Mewujudkan Kota Tangguh Bencana Banjir sehingga Kota Banjarmasin semakin tangguh terhadap bencana banjir di masa yang akan datang.

II. METODE

Penulis menggunakan Teori Fred R. David (2011) yang berisikan 3 dimensi, yaitu: (1)Perumusan. (2)Pelaksanaan, (3)Evaluasi. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami.

Penulis menggunakan Teknik analisis data dengan tahapan: (1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; (2) Reduksi data, yaitu data yang telah diperoleh selama proses penelitian dikumpulkan untuk kemudian dipilih dan difokuskan kepada hal-hal pokok dan penting yang sesuai dengan masalah yang diteliti, kemudian selanjutnya direduksi, dirangkum dan difokuskan pada satu hal sehingga dapat ditentukan pola atau temanya dalam susunan yang sistematis; (3) Penyajian data, bertujuan memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan dan memahami permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menampilkan data yang dibuat dalam bentuk tabel, uraian singkat maupun

bagian; (4) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. yaitu peninjauan ulang melalui pemikiran peneliti mengenai data dan catatan-catatan yang telah didapatkan di lapangan untuk kemudian dipersempit dan difokuskan pembahasannya sehingga kemudian dijadikan sebuah pemikiran sederhana.

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan dari BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat sehingga total informan adalah 10 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis meneliti dan mendeskripsikan strategi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam mewujudkan kota tangguh bencana banjir menggunakan pendapat dari Fred R. David (2011) yang berisikan empat dimensi, yaitu *Perumusan, Pelaksanaan, dan Evaluasi*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Perumusan

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat agar tetap merasa aman dan terhindar dari risiko gangguan dan ancaman baik itu oleh masyarakat sendiri maupun akibat terjadinya bencana. Salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh Kota Banjarmasin adalah banjir yang didasarkan pada hasil kajian risiko bencana pada tahun 2023 yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin. Tugas Pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana adalah memastikan keamanan dan keselamatan publik. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah daerah merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang khususnya ditujukan untuk mengatasi banjir. Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melaksanakan kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan kota tangguh bencana banjir di Kota Banjarmasin

3.1.1. Mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi

Kegiatan identifikasi peluang dan tantangan di lapangan merupakan hal yang penting. Proses identifikasi dapat membantu dalam proses penyaluran logistik dan tahap evakuasi korban bencana. Dengan diketahuinya identifikasi di lapangan dapat membantu tim dalam proses penyaluran logistik dan harus menggunakan kendaraan apa untuk dapat memudahkan menuju lokasi yang telah ditentukan untuk menghindari bahaya serta mempermudah upaya evakuasi dan penyaluran logistik. Pada kegiatan ini BPBD Kota Banjarmasin melalui bidang perencanaan melakukan koordinasi dengan seksi terkait untuk membahas terkait penanganan bencana.

3.1.2. Menetapkan kelebihan dan kelemahan

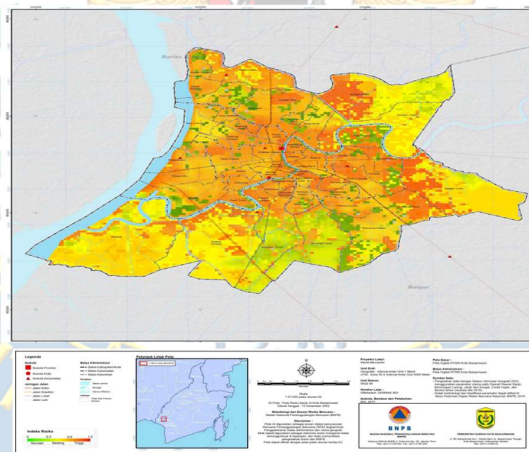
Dalam pelaksanaan strategi terdapat kekurangan dan kelebihan dalam kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kota tangguh bencana banjir. Kekurangan yang ditemukan perlu diperbaiki, sementara kelebihan yang dimiliki perlu dipertahankan. Kelebihan merujuk pada aspek positif atau keunggulan yang dimiliki, sedangkan kekurangan merujuk pada kelemahan yang perlu diperbaiki. Banjarmasin seperti yang dijelaskan di atas diketahui bahwa hasil kajian risiko bencana yang ada yaitu potensi bencana tahunan seperti banjir, cuaca ekstrim dan

kekeringan. Potensi bencana merupakan kelemahan daerah sehingga perlu diperkuat melalui kelebihan yang ada. Kelebihan yang dimiliki kota Banjarmasin dengan adanya panggilan darurat 112 Banjarmasin yang beroperasi selama 24 jam. Layanan 112 merupakan bagian inovasi teknologi terbaru sebagai layanan darurat bagi masyarakat yang mengalami berbagai kedaruratan seperti kebakaran, pohon tumbang, bantuan ambulan, bencana alam, tindakan kriminal, kecelakaan lalu lintas dan bencana lainnya.

3.1.3. Menyusun strategi-strategi dan rencana awal

Strategi awal adalah suatu langkah yang dilakukan sebagai persiapan untuk mempermudah kegiatan terutama kegiatan yang ada di lapangan. Strategi dan rencana awal yang telah disusun diharapkan dapat memberikan kemajuan dan perkembangan dalam pelaksanaan rencana tersebut. Dalam upaya mewujudkan kota tangguh bencana banjir di Kota Banjarmasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kebencanaan telah menyusun strategi dan rencana yang telah disiapkan. Namun, dalam pelaksanaan kinerja di lapangan, kemungkinan akan muncul beberapa hambatan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, strategi dan rencana awal harus disusun dan dipersiapkan dengan baik. Salah satu strategi awal yaitu Mitigasi Nonstruktural dengan pembuatan Peta Risiko Bencana Banjir. Sehingga warga dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang potensi bencananya tinggi bisa meningkatkan kapasitas dan segera beradaptasi untuk mengantisipasi adanya bencana banjir yang rawan akan datang di daerah mereka. Berikut Peta Risiko Banjir di Kota Banjarmasin :

Gambar 1.



Sumber : Album Peta KRB Banjarmasin (2023)

Berdasarkan Peta Risiko Banjir yang terdapat pada gambar di atas, dapat diamati bahwa sebagian besar daerah ditandai dengan warna kuning, yang mengindikasikan tingkat risiko banjir yang sedang. Terdapat juga beberapa daerah yang ditandai dengan warna merah, yang menunjukkan tingkat risiko banjir yang tinggi. Namun, hanya sebagian kecil daerah yang ditandai dengan warna hijau, yang menandakan tingkat risiko banjir yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kota Banjarmasin merupakan daerah yang rentan terhadap bencana banjir, meskipun hanya sebagian daerah yang memiliki risiko tinggi. Peta risiko banjir juga dapat

memudahkan petugas Tim Respon Cepat (TRC) dalam mengetahui daerah mana saja yang memiliki potensi banjir paling tinggi.

3.2. Pelaksanaan

Dalam mewujudkan kota tangguh bencana banjir pemerintah daerah Kota Banjarmasin tidak hanya perlu menyiapkan rencana dan strategi tetapi perlu juga untuk menerapkan dan melaksanakan rencana dan strategi yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya

3.2.1. Mengambil Kebijakan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan khususnya dalam hal menangani banjir. Kebijakan yang diambil dalam meningkatkan ketangguhan kota Banjarmasin dalam menghadapi bencana banjir melalui mitigasi struktural yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan membangun atau memperkuat infrastruktur fisik dan melalui mitigasi nonstruktural artinya upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui pendekatan yang tidak melibatkan pembangunan infrastruktur fisik. Pengambilan kebijakan yang berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan kota tangguh bencana banjir di kota Banjarmasin BPBD mengambil kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui mitigasi nonstruktural. melalui pembentukan Forum Komunikasi Bencana yang tersebar di tiap kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki Forum komunikasi bencana yang ada di kelurahan perwakilan. BPBD dalam setiap kegiatannya akan melibatkan para anggota forum komunikasi bencana, dengan harapan agar bisa membantu masyarakat ketika terjadi bencana mereka tahu dasar-dasar penanganannya sembari menunggu pihak yang berwenang. Dalam pelaksanaan dilapangan Ketika ada bencana mereka tetap harus saling berkoordinasi dengan BPBD sebagai komando kebencanaan daerah.

3.2.2. Memotivasi pegawai dan Masyarakat

Dalam pelaksanaan strategi manajemen menurut Fred R. David memotivasi pegawai dan masyarakat sebagai salah satu indikator. Tindakan memotivasi pegawai memiliki dampak terhadap bagaimana sebuah kebijakan bekerja. Masyarakat yang memiliki motivasi baik akan mendukung program dan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mewujudkan kota yang tangguh bencana banjir. Diperlukan peran pemerintah dalam memberikan motivasi terhadap pegawai dan masyarakat untuk mendukung penuh program yang dijalankan.

3.2.3. Mengalokasikan Sumber Daya yang dimiliki

Alokasi sumber daya adalah penetapan kebijakan atau keputusan dalam suatu organisasi dengan tujuan menentukan sumber daya yang tersedia dan mempersiapkan serta mengalokasikan sumber daya dengan baik. Penganggaran biasanya merupakan proses alokasi sumber daya yang penting bagi kinerja sebagian besar organisasi . Pengalokasian Sumber Daya yang ada di BPBD Kota Banjarmasin telah dialokasikan dengan baik. Sumber daya yang ada terdiri dari personel, peralatan serta sarana prasarana. BPBD juga memiliki personel khusus yang selalu siap siaga selama 24 Jam yang dikenal dengan sebutan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Tim ini terbagi menjadi 3 kelompok dengan pembagian 2 shift dalam satu hari. Setiap kelompok TRC bertugas selama 12 jam setiap 1 shiftnya. TRC beranggotakan orang-orang yang telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai kebencanaan dan pertolongan pertama jika terdapat bencana secara mendadak.

3.3. Evaluasi

Mengevaluasi strategi adalah langkah terakhir dari kinerja yang diperlukan dalam menyelesaikan rangkaian tahapan strategi manajemen. Tujuan dari mengevaluasi strategi ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah kita laksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan dan ingin kita capai.

3.3.1. Mengukur Performa

Dalam mengevaluasi strategi dan rencana-rencana yang telah dilaksanakan maka diperlukan pengukuran terhadap performa untuk mengukur hasil kinerja organisasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja individu, mengevaluasi performa, membandingkan hasil yang sebenarnya dengan hasil yang diharapkan, serta menilai kemajuan yang terjadi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk mengukur performa kebijakan yang telah diambil, pemerintah dapat melakukan evaluasi yang komprehensif. Evaluasi ini dapat membantu pemerintah memahami dampak kebijakan secara lebih mendalam, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, evaluasi juga dapat membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah korektif yang tepat

3.3.2 Mengambil Langkah Korektif

Mengambil langkah korektif merupakan tahap evaluasi yang penting dalam menghadapi kebijakan. Dalam tahap ini, dilakukan peninjauan terhadap implementasi kebijakan yang telah dilakukan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan kebijakan, langkah korektif perlu diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan kebijakan tersebut. Setelah pengambilan kebijakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah korektif jika kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah korektif ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu langkah korektif yang dapat diambil oleh pemerintah daerah kota Banjarmasin adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Berdasarkan pernyataan informan masyarakat diketahui bahwa program normalisasi khususnya pengerukan sungai yang dikerjakan oleh Dinas PUPR memiliki dampak yang negatif terhadap bangunan rumah yang mereka tinggali. Pengerukan sedimentasi didasar sungai menyebabkan turunnya tanah disamping kiri dan kanan sungai yang secara langsung berdampak pada bangunan rumah masyarakat yang ada di Bantaran sungai.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan strategi oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam mewujudkan kota tangguh bencana banjir telah memberikan banyak dampak positif. Penulis menemukan bahwa dalam hal pelaksanaan program dan kebijakan ikut didorong dengan partisipasi

masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas baik dari infrastruktur seperti normalisasi sungai dan revitalisasi sungai, Pembangunan rumah pompa dan pintu air, pembuatan kolam retensi maupun peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan memelihara kebersihan sungai sebagai pengendali banjir di Kota Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan penelitian Novan Suryadi, bahwa Meskipun Pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal penanganan banjir dengan baik tetapi perlu didukung oleh peran masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya sungai (Novan Suryadi,2020).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan strategi oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sudah berjalan baik dengan Kebijakan dan Program untuk mewujudkan kota tangguh bencana banjir. Melalui strategi David dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah kota Banjarmasin dalam merumuskan strategi untuk mewujudkan kota tangguh bencana banjir dengan melakukan penyusunan strategi agar dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin banyak mengambil kebijakan yang bersifat operasional seperti normalisasi Sungai dan inovasi pengelolaan sampah maupun nonoperasional dengan memberikan motivasi kepada pegawai serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mendukung dan menjadikan Kota Banjarmasin tangguh bencana banjir. Dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengetahui secara objektif kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik lagi kedepannya

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya Dimana waktu penelitian hanya diberi waktu selama satu bulan saja dan peneliti merasa waktu tersebut sangat singkat untuk mendalami penelitian yang peneliti lakukan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi kota tangguh bencana untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin serta seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Dwi Nur Ilma. 2019. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros*. Skripsi. Maros. Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/10062/>
- Agustin, Ayu Niken. 2023. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Banjir Di Kota Malang*. Skripsi. Malang. Universitas Islam Malang. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75619>

- BNPB. 2016. *Buku Risiko Bencana Indonesia*. BNPB
- Chandra, Dicky Pangestu. 2021. *Pengurangan Risiko Bencana Banjir Rob di Kota Dumai*. Skripsi. Dumai. Fakultas Teknik. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/9465/1/143410099.pdf>
- Permana, Danny. 2023. *Peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Risiko Bencana banjir di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.171>
- David, Fred R. 2011. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Maula Masthura. 2022. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Banjir di Aceh Utara*. Skripsi. Aceh Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22659/>
- Nurjanah,dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: ALFABETA
- Pramitha, A. A. S., Utomo, R. P., & Miladan, N. 2020. *Efektivitas infrastruktur perkotaan dalam penanganan risiko banjir di Kota Surakarta*. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15. DOI: 10.20961/region.v15i1.23258
- Purwikasari, Heni Tri. 2023. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Pekalongan. Fakultas Perlindungan Masyarakat. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/12634/>
- Rahmadani, Nelvi. 2023. *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Dumai*. Skripsi. Dumai. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/72233/>
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suryadi, Novan. 2020. *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2020,8 (2): 425-436. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/08/Jurnal\[1\]\[1\]\[1\]%20\(08-27-20-12-53-00\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/08/Jurnal[1][1][1]%20(08-27-20-12-53-00).pdf)
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Yuhana, Siti. 2023. *Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon*. Skripsi. Cirebon. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75619>